

**LAPORAN PENELITIAN
PERANAN SULTANAH TSAFIATUDDIN DALAM MEMBANGKITKAN
KEJAYAAN ACEH DARUSSALAM DI BIDANG POLITIK DAN ILMU
PENGETAHUAN (1641--1675)**

OLEH

**Dra. Fatmah, M.Hum.
Yuliarni, S.Pd., M.Hum
Risa Budi Utami, S.Pd.**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
2020**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jend. A. Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telepon 510842

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT TUGAS

Nomor : 3281.b/C.12/FKIP UMP/X/2020

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang menugaskan kepada:

1. Dra. Fatmah, M.Hum.
2. Yuliarni, S.Pd., M.Hum.
3. Risa Budi Utami, S.Pd.

Untuk melaksanakan penelitian dengan judul *"Peranan Sultanah Tsafiatuddin dalam membangkitkan Kejayaan Aceh Darussalam di Bidang Politik dan Ilmu Pengetahuan (1641--1675)"* pada tanggal 20 Oktober 2020.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Palembang, 27 Safar 1442 H.
18 Oktober 2020 M.

Dekan

Dr. H. Rusdy AS., M.Pd.

NBM/NIDN. 882609/0007095908

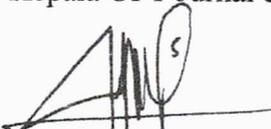
Visi : Menjadi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Berstandar Nasional Dan Menghasilkan Lulusan Yang Berdaya Saing Tinggi Serta Unggul Dalam JPTEKS Yang Berbasis Keislaman Menuju Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Berstandar Internasional Pada Tahun 2022

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN**

1. Judul : Peranan Sultanah Tsafiatuddin dalam membangkitkan Kejayaan Aceh Darussalam di Bidang Politik dan Ilmu Pengetahuan (1641--1675)
2. Bidang Ilmu : Pendidikan Sejarah
3. Penulis
- a. Nama : Dra. Fatmah, M.Hum.
 - b. NIP/NIDN : 0210036902
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor
 - d. Program Studi : Pendidikan Sejarah
 - e. Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 - f. Nomor Hp : 081273748887
 - g. Alamat Email : fatrianafatmah@gmail.com
4. Anggota Penulis :
- 1. Yuliarni, S.Pd., M.Hum
 - 2. Risa Budi Utami, S.Pd.
5. Jumlah Anggaran : Rp 1.500,000,00 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)
(mandiri)

Palembang, 23 Oktober 2020

Mengetahui
Kepala UPT Jurnal dan PPM FKIP UMP,



Sulton Nawawi, S.Pd., M.Pd.
NIDN 0218089101

Ketua Pelaksana,



Dra. Fatmah, M.Hum.
NIDN 0210036902



Mengetahui
Dekan FKIP UMP,

Dr. H. Rusdy AS, M.Pd.
NIDN 882609/0007092908

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Metode Penelitian	7
G. Daftar Istilah	8
PEMBAHASAN	
A. Dasar Pemikiran Sultanah Tsafiatuddin Dalam Memimpin Aceh Darussalam	10
B. Peranan Sultanah Tsafiatuddin Dalam Membangkitkan Kejayaan Aceh Darussalam di Bidang Politik dan Ilmu Pengetahuan	12
1. Peranan Sultanah Tsafiatuddin Dalam Membangkitkan Kejayaan Aceh Darussalam di Bidang Politik	12
2. Peranan Sultanah Tsafiatuddin Dalam Membangkitkan Kejayaan Aceh Darussalam di Bidang Ilmu Pengetahuan.....	13
C. Proses Perkembangan Kebangkitan Aceh Darussalam di Dalam Bidang Politik dan Ilmu Pengetahuan	15
1. Proses Perkembangan Kebangkitan Aceh Darussalam di Dalam Bidang Politik	15
2. Proses Perkembangan Kebangkitan Aceh Darussalam di Dalam Bidang Ilmu Pengetahuan	17
D. Dampak dari Masa Pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin Bagi Kehidupan Masyarakat Aceh Darussalam	18
1. Dampak dari Masa Pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin Bagi Kehidupan Politik Masyarakat Aceh Darussalam	18
2. Dampak dari Masa Pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin Bagi Kehidupan Ekonomi Masyarakat Aceh Darussalam	20
3. Dampak dari Masa Pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin Bagi Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat Aceh Darussalam.....	20
4. Dampak dari masa pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin Bagi Kehidupn Agama Masyarakat Aceh Darussalam	21
Penutup	
Kesimpulan	23
Daftar Rujukan	25

ABSTRAK

Kata Kunci : *Peranan Sultanah Tsafiatuddin Membangkitkan Kejayaan Aceh Darussalam*

Penelitian ini **dilatarbelakangi** keingintahuan penulis terhadap *Peranan Sultanah Tsafiatuddin dalam Membangkitkan Kejayaan Aceh Darussalam di Bidang Politik dan Ilmu Pengetahuan (1641—1675)*. **Permasalahan** ini adalah : (1) Apa yang menjadi dasar pemikiran Sultanah Tsafiatuddin dalam memimpin Aceh Darussalam? (2) Bagaimana peranan Sultanah Tsafiatuddin dalam membangkitkan kejayaan Aceh Darussalam di bidang politik dan ilmu pengetahuan? (3) Bagaimana proses perkembangan kebangkitan Aceh Darussalam di dalam bidang politik dan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin? (4) Bagaimana dampak dari masa pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin bagi kehidupan masyarakat Aceh Darussalam?. **Metode Historis** atau metode sejarah, **Jenis Penelitian** yang penulis gunakan yaitu kajian pustaka (kepastakaan). Penulis menggunakan **pendekatan**, geografi, sosiologi, antropologi, politik, budaya, historis, agama. Penulis juga menggunakan **Tehnik Pengumpulan Data** adalah studi kepustakaan, observasi, dokumentasi. Analisis Data, kritik sumber, interpretasi, historiografi, sehingga penulis berhasil merumuskan beberapa **Kesimpulan** : (1) Dasar pemikiran Sultanah Tsafiatuddin dalam memimpin Aceh Darussalam bersumber dari Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 124 dan surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa hak dan kewajiban pria dan wanita itu sama dalam masyarakat dunia; (2) Peranan Sultanah Tsafiatuddin dalam membangkitkan kejayaan Aceh Darussalam di bidang politik dan ilmu Pengetahuan adalah dengan membuka kesempatan pendidikan bagi kaum wanita agar memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan wanita untuk bekerja dalam lembaga negara, serta mendorong ulama untuk menulis berbagai disiplin ilmu pengetahuan hal ini menjadi titik tolak kebangkitan tradisi tulis-menulis di Aceh Darussalam; (3) Proses perkembangan kebangkitan Aceh Darussalam di dalam bidang politik dan ilmu pengetahuan adalah Sultanah Tsafiatuddin melakukan pembaharuan dalam struktur pemerintahan dengan memberikan dasar kesetaraan gender sehingga dapat memperluas pengertian demokrasi antara laki-laki dan perempuan, Sultanah Tsafiatuddin juga mendorong para ulama menulis berbagai disiplin ilmu pengetahuan, sehingga buku-buku dalam berbagai bidang ilmu karya para ulama menjadi rujukan dan menjadi pusat peradaban perkembangan ilmu pengetahuan di Asia Tenggara; (4) Dampak dari masa pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin bagi kehidupan masyarakat Aceh Darussalam, membuka semua pusat pendidikan bagi kaum wanita untuk menyetarakan kedudukan wanita agar sama dengan laki-laki dalam segala bidang pemerintahan di Aceh Darussalam, menjadi bandar perdagangan internasional yang sangat makmur karena letaknya strategis di jalur pelayaran dari Barat ke Timur, masyarakat Aceh Darussalam termotivasi untuk lebih menghargai kemampuan seseorang dalam memimpin dan membina Tamadun Melayu, serta hidup rukun dengan mengikuti perintah Allah SWT dan Rasul-Nya karena senantiasa mengikuti ajaran Al-Qur'an & As-Sunah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Aceh, termasuk dalam rumpun bangsa-bangsa Melayu, yaitu kelompok bangsa Manteue atau Mante atau disebut juga Bante, Lanun, Sakai, Jakun, Semang (orang laut), Senui, dan lain-lain yang berasal dari negeri Perak dan Pahang di Semenanjung Malaka. Seumileuk artinya dataran yang luas. Bangsa Mante inilah yang kemudian berkembang ke seluruh lembah Aceh tiga segi dan kemudian berpindah ke tempat-tempat lainnya. Lembah Aceh Besar (Aceh Tiga Segi) di wilayah pantai Laut Indrapuri dan Tanoh Abee (tanah pasir halus).

Orang-orang asing yang pernah datang ke Aceh menyebutnya dengan nama yang berbeda-beda. Orang-orang Portugis dan Italia menyebutnya dengan nama Achem, Achen, dan Aceh, orang Arab menyebutnya dengan nama Asyi, Dachem, Dagin, Dacin, sedangkan orang Cina menyebutnya dengan nama Atje dan Tashi. "Aceh juga merupakan nama salah satu suku bangsa atau etnis sebagai penduduk asli yang mendiami Bumi Aceh. Terdapat cukup banyak etnis yang bermukim di wilayah Aceh, yakni etnis Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk, Jamee, Kluet, Simeulue, dan Singkil" (Abdy, 2013: 1-2).

Islam muncul dan membuat sebuah perubahan besar pada tatanan kehidupan dunia pada abad VII. Islam mendorong umatnya untuk membuka pikiran dan cakrawala. Allah SWT berfirman : "Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah (Allah), karena itu berjalanlah kamu ke (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul)" (QS. Al-Imran: 137).

Kepulauan Nusantara dan Semenanjung Tanah Melayu merupakan wilayah-wilayah yang sangat strategis, oleh karena terletak diantara Lautan Hindia dan Laut Cina Selatan yang menghubungkan negeri-negeri sebelah Timur, seperti Cina dan Jepang, dengan negeri-negeri sebelah Barat, yaitu anak benua India, Parsi dan negara-negara Arab, Afrika, serta benua Eropa. Pulau Sumatera letaknya lebih dekat dengan Teluk Parsi dan Benggala atau ke India Muka dan India Belakang.

Kepulauan Nusantara sudah dikenal sebagai penghasil rempah-rempah serta hasil bumi lainnya yang amat diminati oleh pedagang-pedagang dari Timur dan dari Barat. Di Selat Malaka bermunculanlah pelabuhan-pelabuhan transit tempat bertemunya para kapal dan saudagar-saudagar yang mengadakan transaksi perniagaannya, sambil menunggu giliran datangnya angin musim Timur-Laut dan Barat-Daya yang akan membawa saudagar tersebut kembali ketempat tujuan masing-masing.

Hindia Timur atau Indonesia telah lama dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah seperti vanili, lada, dan cengkeh. Rempah-rempah ini digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, bahkan obat-obatan, karena kegunaannya, rempah-rempah ini sangat laku dipasaran dan harganya juga mahal. Hal inilah yang mendorong para pedagang Asia Barat datang dengan tujuan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Jatuhnya Kota Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Turki Utsmani mengakibatkan pasokan rempah-rempah ke wilayah Eropa terputus, adanya boikot yang dilakukan oleh Turki Utsmani mendorong orang-orang Eropa menjelajahi jalur pelayaran ke wilayah yang banyak memiliki rempah-rempah hingga sampai ke kepulauan di Nusantara.

Pada awalnya tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah dari para petani Indonesia. Namun, dengan semakin meningkatnya kebutuhan rempah-rempah di Eropa serta keuntungannya yang sangat tinggi, bangsa Eropa kemudian mulai mengklaim daerah-daerah yang dikunjungi sebagai daerah kekuasaannya. “Bangsa Eropa memonopoli perdagangan rempah-rempah serta hasil bumi lainnya dengan mengeruk kekayaan alam sebanyak mungkin” (Abdy, 2013: 10-20).

Ketika Malaka jatuh ketangan Portugis pada tahun 1511, daerah-daerah pengaruhnya yang terdapat di Sumatra mulai melepaskan diri dari Malaka. Keadaan ini sangat menguntungkan kemakmuran Kerajaan Aceh yang mulai berkembang. Dibawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah, Aceh mulai melebarkan kekuasaannya ke daerah-daerah sekitarnya. “Operasi-operasi militer diadakan terhadap wilayah-wilayah ini tidak saja dengan tujuan agama dan

politik, tetapi juga dengan tujuan ekonomi” (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008: 335).

Kesultanan Aceh Darussalam berdiri menjelang runtuhnya Kerajaan Samudera Pasai dan Kerajaan Lamuri. Kesultanan Aceh Darussalam terletak di Utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Kutaraja (Banda Aceh). Sultan pertama yang memerintah bernama Sultan Ali Mughayat Syah yang dinobatkan pada Ahad, 1 Jumadil Awal 913 H atau pada tanggal 8 September 1507. “Di awal pemerintahan Sultan Ali Mughayat Syah, cakupan wilayahnya meliputi Daya, Deli, Pidie, Pase, Lamuri, dan Aru” (Darmawan dan Anwarsono, 2016: 47).

Pada bulan Mei tahun 1521, Sultan Aceh Darussalam pertama, Sultan Ali Mughayat Syah memimpin secara langsung perang melawan Portugis dengan didampingi oleh saudara laki-lakinya bernama Raja Ibrahim, selaku Panglima perang “Sultan Ali Mughayat Syah bekerja dengan sesama Kerajaan Islam lainnya di Nusantara, salah satu diantaranya adalah Kerajaan Islam Demak di Jawa” (Abdy, 2013: 98).

Pada tahun 1524, Kerajaan Pedir dan Kerajaan Samudra Pasai ditaklukan dan dimasukkan ke dalam wilayah Kesultanan Aceh Darussalam dibawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah, hal tersebut dibuktikan dengan dipindahkan Lonceng Cakra Donya ke Istana Kesultanan Aceh Darussalam, lonceng tersebut merupakan sebuah hadiah dari Raja Cina untuk Kerajaan Samudra Pasai (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008: 28).

Kesultanan Aceh Darussalam mencapai masa kejayaannya ketika dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Masa pemerintahan berlangsung selama 29 tahun, yaitu dari tahun 1607 hingga tahun 1636. “Kendali kerajaan berjalan dengan lancar di semua pelabuhan di pantai Barat Sumatera, pantai Timur, hingga ke Asahan di Selatan, bahkan mencakup Semenanjung Melayu. Oleh sebab itu, Kesultanan Aceh Darussalam ini sangat kaya dan menjadi pusat ilmu pengetahuan” (Darmawan dan Arsono, 2016: 48).

Sebelum Sultan Iskandar Muda mangkat dalam keadaan sakit berat, telah menetapkan menantunya, Raja Bungsu sebagai putera mahkota yang akan menggantikannya, dengan persetujuan Kadli Malikul Adil dan anggota-anggota Balai Gading. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, maka dinobatkanlah Raja

Bungsu menjadi Sultan Aceh dengan gelar Sultan Alaidin Mughayat Syah Iskandar Tsani dalam usia 25 tahun. “Sultan Iskandar Tsani memerintah selama 5 tahun, beliau mangkat dalam usia 30 tahun, tanpa meninggalkan ahli waris yang akan menggantikanya” (Hasjmy, 1977: 48).

Selepas Sultan Iskandar Tsani mangkat dan tidak ada putera mahkota, maka para ulama terkenal Aceh seperti Abdul Rauf Singkil (Syiah Kuala) dan Nuruddin Ar-Raniry setelah lama bermusyawarah memutuskan Tsafiatuddin istri dari Sultan Iskandar Tsani menjadi Sultanah menggantikan Sultan Iskandar Tsani. Sultanah Tsafiatuddin adalah sultan perempuan pertama dalam kerajaan Aceh Darussalam yang dikhabarkan tidak terlalu jauh berbeda kemampuannya dibandingkan dengan seorang lelaki.

Sultanah Tsafiatuddin memiliki sifat terpuji dan perangai yang baik dan sangat takut akan Allah Ta’ala serta melaksanakan salat secara mengikut waktunya. Sultanah Tsafiatuddin gemar membaca kitab suci Al-Qur’an dengan menyuruh orang berbuat kebajikan serta melarang berbuat kemungkaran. Sebagai sultan perempuan pertama beliau dikhabarkan memerintah dan menghukum sesuatu dengan sangat adil. “Sebagai akibat daripada sifat adil dan arif, maka banyak orang yang menuntut ilmu dan melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam” (Adan, 2014: 213-214).

Dalam melaksanakan pemerintahan, Sultanah Tsafiatuddin didukung penuh oleh para menteri, orang-orang besar, dan para ulama. Ada dua ulama cerdas pandai yang mendampingi dalam soal-soal keagamaan, yaitu Nurrudin Ar-Raniry dan Syekh Abdul Rauf Singkil. “Sultanah Tsafiatuddin berhasil mengatasi ujian berat dan membuktikan bahwa kecakapannya dalam memerintah tidak kalah dengan kaum laki-laki” (Abdy, 2013: 163).

Masa pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin, menjadikan Aceh dapat mencapai kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan, banyak kitab-kitab dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dikarang, baik atas permintaan Sultanah Tsafiatuddin atau atas kehendak para Ulama itu sendiri. Salah seorang Ulama Besar yang mendapat dorongan Sultanah Tsafiatuddin untuk mengarang kitab-kitab, yaitu Syekh Abdurrauf Fansury As Singkily, dengan kitab *Miratuth Thullah fi Tahili Makrifatil Ahkam* untuk menjadi pedoman bagi para Qadli (Hakim)

dalam menjalankan tugasnya. Kepada Syekh Nuruddin Ar Raniry diminta agar mengarang kitab Hidayatul Imam untuk kepentingan rakyat umum.

Sehubungan fakta-fakta di atas, maka penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian tentang *Peranan Sultanah Tsafiatuddin Dalam Membangkitkan Kejayaan Aceh Darussalam di Bidang Politik dan ilmu Pengetahuan*. Penulis mengangkat judul ini karena penulis ingin memberikan pengetahuan kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya agar lebih mengerti dan memahami tentang pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin di Kesultanan Aceh Darussalam.

Penelitian tentang Aceh Darussalam sebelumnya sudah pernah telah ditulis oleh Yovi Irawan (352008067) Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2014 dengan judul Peranan Kerajaan Aceh Darussalam Dalam Penyebaran Agama Islam Di Aceh Darussalam Pada Tahun (1607—1636). Penelitian selanjutnya tentang peranan tokoh wanita yang terdapat di Aceh, yang ditulis oleh Aries (352010124) pada tahun 2014 Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2014 dengan judul Peranan Keumalahayati Dalam Mempertahankan Kerajaan Aceh Dari Kolonialisme Portugis dan Belanda (1585—1604).

B. Batasan Masalah

Untuk mencapai titik fokus dalam penelitian ini, maka harus ada pembatasan masalah adapun batasan masalah dalam penulisan penelitian ini dibedakan menjadi dua aspek yaitu :

1. Aspek Spatial (ruang atau wilayah), dalam penelitian ini penulis membatasi kajian di wilayah Aceh Darussalam, karena Sultanah Tsafiatuddin memerintah di kawasan wilayah Kesultanan Aceh Darussalam.
2. Aspek temporal (waktu), terhadap aspek temporal penulis membatasi penulisan dari tahun 1641—1675, karena masa pemerintahan Sultanah Safiatuddin dimulai pada tahun 1641 setelah Sultan Iskandar Tsani wafat pada tanggal 15 Februari 1641, Sultanah Tsafiatuddin diangkat

menjadi Sultan di Kesultanan Aceh Darussalam, hingga berakhir pada tahun 1675 M.

C. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pemikiran Sultanah Tsafiatuddin dalam memimpin Aceh Darussalam ?
2. Bagaimana peranan Sultanah Tsafiatuddin dalam membangkitkan kejayaan Aceh Darussalam di bidang politik dan ilmu pengetahuan?
3. Bagaimana proses perkembangan kebangkitan Aceh Darussalam dalam bidang politik dan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin?
4. Bagaimana dampak dari masa pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin bagi kehidupan masyarakat Aceh Darussalam ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian tentang *Peranan Sultanah Tsafiatuddin Dalam Membangkitkan Kejayaan Aceh Darussalam di Bidang Politik dan Ilmu Pengetahuan 1641—1675*, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pemikiran Sultanah Tsafiatuddin dalam memimpin Aceh Darussalam.
2. Untuk mengetahui peranan Sultanah Tsafiatuddin dalam membangkitkan kejayaan Aceh Darussalam di bidang politik dan ilmu pengetahuan.
3. Untuk mengetahui proses perkembangan kebangkitan Aceh Darussalam dalam bidang politik dan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin.
4. Untuk mengetahui dampak dari masa pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin bagi kehidupan masyarakat Aceh Darussalam.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan antara lain:

1. Bagi penulis penelitian ini akan menambah pengetahuan, baik dalam metode penulisan maupun materi khususnya tentang Peranan Sultanah Tsafiatuddin Dalam Membangkitkan Kejayaan Aceh Darussalam di Bidang Politik dan Ilmu Pengetahuan (1641—1675).

2. Bagi lembaga, hasil penelitian ini akan memperkaya data inventarisasi perpustakaan FKIP UMP khususnya mengenai buku kesejarahan tentang Kerajaan Aceh, khususnya tentang Peranan Sultanah Tsafiatuddin Dalam Membangkitkan Kejayaan Aceh Darussalam di Bidang Politik dan Ilmu Pengetahuan (1641—1675).
3. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan perihal Sejarah Nasional Indonesia dan dapat dijadikan referensi dalam penelitian lebih lanjut mengenai Kerajaan Aceh Darussalam.

4. Metode Penelitian

Menurut Sugiono (2011: 2), metode adalah “cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Selanjutnya Sjamsuddin (2007:12), menyatakan bahwa: Metode merupakan suatu prosedur untuk mendapatkan suatu objek yang dianggap sebagai suatu cabang logika yang berhubungan dengan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk menyelidiki kedalaman atau eksposisi dari berbagai subjek suatu ilmu (sains), seni atau disiplin tertentu secara keseluruhan berdasarkan keterampilan-keterampilan atau teknik-teknik tertentu.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa metode adalah suatu kerangka kerja dalam penelitian yang berisikan konsep yang mengkaji suatu peristiwa sejarah yang akan diteliti. Dengan kata lain metode adalah suatu ilmu yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian secara benar dan ilmiah.

Menurut Sugiono (2011: 32), metode penelitian adalah ”metode yang digunakan untuk memilih jenis metode yang digunakan dalam suatu penelitian karya ilmiah”, sedangkan menurut Nurul (2005: 28), metode penelitian adalah ”suatu usaha yang dilakukan dengan cara ilmiah untuk mendapatkan data-data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu usaha yang dilakukan dengan cara ilmiah untuk mendapatkan data-data serta memilih jenis metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian karya ilmiah. Dalam penelitian yang berjudul Peranan Sultanah

Tsafiatuddin dalam Membangkitkan Kejayaan Aceh Darussalam di Bidang Politik dan Ilmu Pengetahuan (1641—1675), dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode historis atau metode sejarah.

Menurut Hamid (2011: 42), metode sejarah adalah "suatu prosedur dalam menyusun data yang telah disimpulkan dari dokumen otentik menjadi suatu kisah yang saling berhubungan", sedangkan menurut Abdurrahman (2007: 103), metode sejarah adalah "seperangkat aturan dan prinsip yang sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, misalnya secara kritis, dan mengajukan sintesa dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis". Berdasarkan definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa metode sejarah adalah seperangkat aturan dalam menyusun data secara sistematis dengan mengumpulkan sumber sejarah secara efektif yang kemudian disimpulkan menjadi suatu kisah yang saling berhubungan dalam bentuk tertulis.

5. Daftar Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan terhadap kata-kata penting yang terdapat dalam judul penelitian. Dalam penelitian tentang Peranan Sultanah Tsafiatuddin Dalam Membangkitkan Kejayaan Aceh Darussalam di Bidang Politik dan Ilmu Pengetahuan (1641—1675). Penulis dapat menguraikan beberapa definisi istilah yang di dapat dari Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1976) sebagai berikut:

- Aceh : Daerah yang sekarang dinamakan Daerah Istimewa Aceh. Pada masa Aceh masih sebagai kerajaan, yang dimaksud dengan yang namanya kabupaten Aceh Besar atau dalam bahasa Aceh disebut Aceh Rayeuk. Aceh Rayeuk disebut Aceh sebenarnya, karena daerah itulah mulanya menjadi daerah inti kerajaan Aceh dan juga disitulah terletak ibukota kerajaanya, yakni yang bernama Bandar Aceh.
- Agung : Besar; mulia; luhur

Agama	: Segenap kepercayaan (kepada Tuhan, Dewa) serta dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.
Al-Hadis	: Setiap tulisan yang berasal dari perkataan atau pun percakapan Rasulullah Muhammad SAW.
Al-Qur'an	: Sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad.
Bangsa	: Kesatuan dari orang-orang yang sama atau bersamaan asal keturunan, bahasa, adat dan sejarahnya yang dibawah pemerintahan sendiri.
Ekspedisi	: Pengiriman surat-surat, barang-barang; bagian pengiriman; buku catatan surat-surat yang dikirimkan; 2 perjalanan ke sesuatu daerah untuk menyelidiki.
Hartawan	: orang yang banyak hartanya; orang kaya.
Ijma'	: Kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi.
Islam	: Agama yang diajarkan oleh nabi Muhammad Saw; orang yang memeluk agama Islam.
Kapal	: Perahu besar yang bergeladak: api (asap), kapal yang dijalankan dengan mesin yang digerakkan oleh asap, kapal untuk memuat barang dagangan.
Keamanan	: Ketentraman; keadaan aman.
Kebijakan	: Kepandaian, kemahiran; bijaksana.
Kekuasaan	: Kekuasaan merupakan kuasa untuk mengurus pemerintahan dan sebagainya.
Kesultanan	: Daerah yang diperintah oleh sultan; kerajaan.
Konspirasi	: Suatu persekongkolan untuk menjalankan rencana besar

BAB II

PEMBAHASAN

A. Dasar Pemikiran Sultanah Tsafiatuddin dalam Memimpin Aceh Darussalam

Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh Darussalam diakui sebagai sebuah kerajaan Islam terbesar dan terkuat di Asia Tenggara, yang berdiri sejajar dengan kerajaan-kerajaan Islam di dunia. Sultan Iskandar Muda merupakan sosok penguasa yang menjadi pemimpin yang membanggakan dan menjadi lambang kemegahan Aceh yang tidak hanya dalam luasnya pengaruh kekuasaan, tetapi juga di dalam struktur pemerintahan dengan rakyatnya yang sangat makmur, Sultan Iskandar Muda juga berhasil menyusun undang-undang pemerintahan yang dikenal dengan Adat Meukuta Alam yang berisikan aturan dan hukum yang berlandaskan Hukum Agama.

Sultan Iskandar Muda wafat pada 28 Rajab 1046 H atau 27 Desember 1636 M, dan digantikan oleh Sultan Iskandar Tsani, seorang yang adil, bijaksana serta sangat mengasihi rakyatnya, dengan meneruskan aturan yang dibuat oleh Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Tsani mengurangi ekspansi kesultanan, akan tetapi lebih menekankan kepada pembangunan mental agama dan ekonomi. Setelah menduduki tahta Kesultanan Aceh Darussalam selama lima tahun, Sultan Iskandar Tsani wafat pada 15 Februari 1641, tanpa keturunan. Rakyat Aceh dan pihak kesultanan kebingungan mencari pengganti sebab, Sultan Iskandar Tsani hanya memiliki seorang permaisuri dan tidak mempunyai kerabat laki-laki.

Di sisi lain Sultan Iskandar Muda mempunyai 3 orang anak. Pertama adalah seorang anak perempuan bernama Puteri Tsafiatuddin yang merupakan buah hati Sultan Iskandar Muda dengan Permaisuri Puteri Sendi Ratna Indra atau Puteri Sani dari Reubee. Kedua, dari selir yang berasal dari Habsyi, Sultan Iskandar Muda memperoleh anak laki-laki bernama Imam Hitam. Anak terakhir Sultan Iskandar Muda adalah laki-laki bernama Meurah Peupok dari istri selir yang berasal dari Gayo. “Menurut adat serta hukum yang berlaku di Aceh saat itu, anak dari selir tidak dapat diangkat menjadi raja atau sultan” (Abdy, 2013: 160-162).

Pada akhirnya Puteri Tsafiatuddin naik tahta menjadi Sultanah di Kesultanan Aceh Darussalam, hal ini menimbulkan pro dan kontra, karena selama ini Aceh belum pernah dipimpin oleh seorang wanita, banyak ulama yang tidak menyetujui pengangkatan Sultanah Tsafiatuddin. “Penolakan ini didasari keyakinan bahwa wanita dilarang menjadi pemimpin” (Astuti, 2013: 18).

Sejak dari Kerajaan Islam Perlak, Kerajaan Islam Samudra Pasai sampai-kepada Kesultanan Aceh Darussalam, ajaran Islam telah diambil menjadi dasar negara, dan sumber hukumnya, yaitu Al-Qur’an, Sunnah, Ijmak dan Qiyas. Dalam Adat Meukuta Alam (Undang-Undang Dasar Kesultanan Aceh Darussalam) tersebut, Kanun Meukuta Alam Al Asyi, berisi yaitu: 1) Al-Qur’an, 2) Al-Hadis, 3) Ijmak Ulama Ahlus Sunnah, 4) Al Qiyas.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa yang artinya: “dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun” (Q.S. An-Nisa: 124).

Menurut pandangan Islam, bahwa hak dan kewajiban pria dengan wanita sama dalam masyarakat bangsa dan dalam masyarakat dunia. Kalaupun ada berlebih dan berkurang, semata-mata terletak pada nilai takwanya. Allah SWT berfirman dalam (Q.S. Al-Hujarat: 13) yang artinya: Wahai Manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti (Q.S. Al-Hujurat: 13).

Betapa besar perhatian Allah kepada kaum wanita, antara lain terbukti bahwa dalam Al-Qur’an terdapat sebuah surat yang bernama ”Surat An-Nisa”, surat wanita, dimana di dalamnya banyak dibicarakan masalah-masalah tentang wanita dan masyarakatnya. Mengenai hak wanita untuk memegang jabatan-jabatan dalam negara, jabatan yang tertinggi, dinyatakan boleh asal mereka “sanggup dan mempunyai pengetahuan untuk bidang-bidang jabatan yang akan dipegangnya; sama seperti hak pria dalam hal tersebut” (Hasjmy, 1977: 21-24).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar pemikiran Sultanah Tsafiatuddin dalam memimpin Aceh Darussalam, bersumber dari ajaran Al-Qur'an terutama dari surat An-Nisa ayat 124 dan surat Al-Hujurat ayat 13, sehingga Sultanah Tsafiatuddin menerima pengangkatan menjadi sultanah di Aceh Darussalam.

B. Peranan Sultanah Tsafiatuddin dalam Membangkitkan Kejayaan Aceh Darussalam di Bidang Politik dan Ilmu Pengetahuan

Masa pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin bukan masa yang menyenangkan, karena memerintah dalam suasana yang penuh tipu daya, intrik-intrik asing, bahaya pengkhianatan dari orang-orang yang ingin menjatuhkan dan merebut kursi kesultanan. Dengan kesabaran serta kebijaksanaan dan kepribadian luar biasa yang dimilikinya, Sultanah Tsafiatuddin mampu memerintah Kesultanan Aceh Darussalam selama 34 tahun sebagai Sultanah Aceh. Sultanah Tsafiatuddin adalah sosok yang mempunyai sifat terpuji, hal ini dapat dilihat dari kebiasaan dan kedisiplinan dalam melakukan shalat lima waktu, membaca Al-Qur'an, senantiasa menyiarkan kepada orang-orang untuk berbuat kebajikan dan melarang orang untuk berbuat kejahatan seperti yang diajarkan Islam melalui kitab dan Nabi S.A.W" (Abdy, 2013: 163). Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan beberapa peranan Sultanah Tsafiatuddin dalam membangkitkan kejayaan Aceh Darussalam di bidang politik dan ilmu pengetahuan.

1) Peranan Sultanah Tsafiatuddin dalam Membangkitkan Kejayaan Aceh Darussalam di Bidang Politik

Sultanah Tsafiatuddin telah berhasil dalam mengatasi berbagai kesulitan dalam Kesultanan Aceh Darussalam, untuk membuktikan kecakapannya dalam memerintah yang tidak ketinggalan dari seorang lelaki, dengan "keberhasilannya mengadakan pembaharuan dalam kesultanan dengan memperluas pengertian demokrasi yang selama ini kurang disadari oleh pihak lelaki sendiri" (Adan, 2014: 217).

Sultanah Tsafiatuddin juga melakukan pembangunan terhadap pertahanan militer dengan membentuk pasukan khusus wanita, yang bertugas mengawasi istana sekaligus sebagai pasukan elite kesultanan. "Terlepas dari pro dan kontra tentang kepemimpinan Sultanah Tsafiatuddin, tidak dapat dipungkiri bahwa

pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin berusaha sekuat tenaga untuk memajukan Kesultanan Aceh Darussalam dalam segala bidang kehidupan” (Astuti, 2013: 18).

Sultanah Tsafiatuddin adalah seorang negarawan, kelebihan dalam politik kenegaraan terlihat dari kuatnya dukungan para menteri, orang besar dan para ulama. Menurut catatan, lembaga kenegaraan Tiga Sagi diadakan oleh Sultanah Tsafiatuddin, masa pemerintahan dalam keadaan penuh dengan tipudaya (intrigues) asing, penuh dengan bahaya pengkhianatan dari tokoh-tokoh yang ingin merebut “kekuasaan di Aceh Darussalam, yang tidak akan dapat dilampaui dengan selamat tanpa kebijaksanaan dan keluarbiasaan yang dimiliki dalam kepribadian tokoh wanita Sultanah Tsafiatuddin” (Said, 1961: 191).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan Sultanah Tsafiatuddin dalam membangkitkan kejayaan Aceh Darussalam di bidang politik adalah dengan mempertahankan identitas Aceh, mengatasi berbagai kesulitan dalam Kesultanan Aceh Darussalam dengan membuktikan kecakapannya dalam memerintah, mengadakan pembaharuan dengan membuka kesempatan pendidikan bagi kaum wanita agar memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan wanita untuk bekerja dalam segala lembaga negara, serta berusaha sekuat tenaga untuk memajukan Kesultanan Aceh Darussalam dalam segala bidang kehidupan.

2) Peranan Sultanah Tsafiatuddin dalam Membangkitkan Kejayaan Aceh Darussalam di Bidang Ilmu Pengetahuan

Pada masa pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin muncul ulama-ulama besar seperti Syekh Nuruddin Ar-Raniry, Syekh Abdur Rauf Syiah Kuala, Syekh Jalaluddin Tursani, Sultanah Tsafiatuddin mendorong para ulama untuk menulis berbagai disiplin ilmu pengetahuan, hal ini terbukti dalam beberapa buku disebutkan kata-kata anjuran dari sultanah untuk menyusunnya, sehingga menyebabkan ibukota “Kesultanan Aceh Darussalam menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Asia Tenggara” (Adan, 2014: 130).

Tindakan Sultanah Tsafiatudin dalam mendorong para ulama untuk rajin menuliskan buah pemikirannya ke dalam kitab menjadi titik tolak kebangkitan tradisi tulis-menulis di Aceh Darussalam. Tercatat berbagai macam disiplin ilmu

berhasil dituliskan di abad pencerahan ilmu pengetahuan tersebut. Syekh Nurudin Ar-Raniry berhasil menuliskan kitab *Hidayatul Iman Fi Fadhil Manan* beserta 30 judul lainnya. Sedangkan Syekh Abdur Rauf Syiah Kuala menyelesaikan kitab *Miratuth Tullab* dan 10 buku lainnya dari berbagai disiplin ilmu. Sebagai bentuk apresiasi, kedua ulama tersebut “menyematkan dalam kitabnya bahwa karya tersebut ditulis atas anjuran Sultanah Tsafiatuddin, kemajuan tersebut menempatkan Aceh sebagai mercusuar peradaban ilmiah” (Madjid, 2013: 133).

Mementingkan kesejahteraan dan keselamatan rakyat serta berusaha agar pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum Allah dilakukan Sultanah Tsafiatuddin dengan meminta kedua ulama tersebut agar mengarang kitab, tetapi sekaligus telah memberi nilai kepada Sultanah Tsafiatuddin yang dinyatakan dengan tegas bahwa sultanah sebagai seorang Raja Besar yang taat kepada Allah dan menjalankan hukum Allah dalam pemerintahan, banyak kitab-kitab yang dikarang di masa pemerintahan sultanah, baik atas permintaan ataupun keinginan ulama sendiri. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan “Sultanah Tsafiatuddin sanggup menjadikan Kesultanan Aceh Darussalam sebagai pusat kegiatan ilmu dan kebudayaan di daerah Asia Tenggara” (Hasjmy, 1977: 110).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, peranan Sultanah Tsafiatuddin dalam membangkitkan kejayaan Aceh Darussalam di bidang ilmu pengetahuan adalah mendorong para ulama untuk menulis berbagai disiplin ilmu pengetahuan, para ulama yang rajin menuliskan buah pemikirannya ke dalam kitab menjadi titik tolak kebangkitan tradisi tulis-menulis di Aceh Darussalam. Tercatat berbagai macam disiplin ilmu berhasil dituliskan di abad pencerahan ilmu pengetahuan tersebut, kedua ulama tersebut menyematkan dalam kitabnya bahwa karya tersebut ditulis atas anjuran Sultanah Tsafiatuddin, kemajuan tersebut menempatkan Aceh sebagai mercusuar peradaban ilmiah. Buku-buku dalam berbagai bidang ilmu karya para ulama pada masa Sultanah Tsafiatuddin, menjadi rujukan dan menjadi pusat peradaban perkembangan ilmu pengetahuan di Asia Tenggara.

C. Proses Perkembangan Kebangkitan Aceh Darussalam dalam Bidang Politik dan Ilmu Pengetahuan Pada Masa Pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin

Keberadaan pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin yang memerintah selama 34 tahun diperkirakan suatu masa yang sangat lama bagi seseorang sultan wanita. Berbagai tantangan dan rintangan yang dihadapinya dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana selama jangka waktu tersebut. Diperkirakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi seorang perempuan sehingga dapat berkuasa dalam sebuah kerajaan yang demikian besar dan lama serta penuh dengan berbagai serangan dari luar dan dalam. Bangsa Aceh memiliki seorang raja perempuan yang pandai dan berkemampuan.

Fungsi politik setelah masa Sultan Iskandar Muda, kembali bersinar dalam masa pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin. Pada zaman ini terkenal dengan zaman keemasan dalam bidang ilmu pengetahuan di Kesultanan Aceh Darussalam, karena fungsi politik dan pengurusannya lebih diutamakan kepada bidang pendidikan baik untuk lelaki maupun wanita. Sultanah Tsafiatuddin menaruh banyak perhatian terhadap kedudukan kaum wanita, untuk mewujudkan maksud tersebut beliau telah memerintahkan untuk dibukanya semua pendidikan untuk lelaki dan wanita. Untuk wanita diberikan hak sama dengan kaum lelaki dalam bidang pendidikan, untuk bekerja dalam lembaga negara dan badan-badan pemerintahan, juga dalam bidang ketentaraan. Fungsi politik dan pengurusan Kesultanan Aceh Darussalam, lebih berpedoman kepada Meukuta Alam yang menjadi Undang-Undang Dasar Kesultanan Aceh Darussalam pada masa itu, "Meukuta Alam bersumberkan Al-Qur'an, Al- Hadis, Ijma', dan Qiyas itu menetapkan empat jenis badan yang berkenaan dengan pengurusan negara" (Adan, 2014: 130- 214). Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjelaskan beberapa proses perkembangan kebangkitan Aceh Darussalam di bidang politik dan ilmu pengetahuan.

1) Proses Perkembangan Kebangkitan Aceh Darussalam dalam Bidang Politik

Pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin didukung penuh oleh para menteri, orang-orang besar, dan para ulama, serta memberikan dasar kesetaraan gender bagi masyarakat Aceh, sehingga memperluas pengertian demokrasi di dalam

pemerintahannya. Sultanah Tsafiatuddin memperbanyak jumlah anggota dari satu badan kesultanan yang disebut “Badan Mahkamah atau Badan Musyawarah, dengan memasukkan sejumlah 22 orang wanita, utusan dari Mukim Tiga Sagi, yaitu XXII Mukim, XXV Mukim, dan XXVI Mukim di Aceh Besar” (Hasjmy, 1977: 125).

Mukim merupakan sebuah tingkatan dalam pembagian daerah berdasarkan kekuasaan feodal uleebalang, yang diterapkan pada masa Kesultanan Aceh Darussalam. Sejak perubahan itu maka hak untuk menentukan pengangkatan sultan atau ahli warisnya dipegang dan dilakukan dengan musyawarah oleh ketiga orang Panglima Sagi. Para Panglima Sagi adalah orang-orang yang berkuasa penuh dalam pemerintahan dalam negeri serta wilayahnya masing-masing, sedangkan untuk Badan atau Balai Musyawarah mempunyai 3 tingkatan, yaitu Balairung, Balai Gading, dan Balai Majelis Mahkamah Rakyat. “Balairung dilengkapi dengan 4 Hulubalang terbesar di Aceh Raya, Balai Gading dilengkapi dengan 22 orang Ulama Besar, Balai Majelis Mahkamah Rakyat dilengkapi dengan 73 anggota yang berasal dari 73 mukim yang masing-masing mukim diwakili oleh 1 orang” (Abdy, 2013: 164).

Balairung yaitu lembaga yang dipimpin oleh Sultanah Tsafiatuddin, anggotanya terdiri dari Hulubalang Empat dan Tujuh, lembaga ini bertugas membuat rencana dan penelitian; hampir sama dengan BAPENAS sekarang. Balai Gading, yaitu lembaga yang dipimpin Wazir Mu’adhdham Orang Kaya Laksamana Seri Perdana Menteri; semacam Dewan Menteri atau Kabinet sekarang. “Balai Majelis Mahkamah Rakyat, yaitu lembaga yang dipimpin oleh Kadli Malikul Adil beranggotakan 73 orang; semacam Dewan Perwakilan Rakyat sekarang” (Hasjmy, 1977: 25).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada proses perkembangan kebangkitan Aceh Darussalam dalam bidang politik mendapat dukungan penuh oleh para menteri, orang-orang besar, dan para ulama. Pembaharuan dalam struktur pemerintahan memberikan dasar kesetaraan gender dapat memperluas pengertian demokrasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam Majelis Mahkamah Rakyat yang beranggotakan 73 orang, telah diwakili oleh wanita sampai 22 orang, maka tidak heran apabila Sultanah Tsafiatuddin tidak

terlalu sulit untuk meluluskan undang-undang mengenai perbaikan nasib dan peningkatan kedudukan wanita dalam masyarakat Aceh. Keahlian dan kebijaksanaan Sultanah Tsafiatuddin, dalam menjalankan upaya pemerintahannya dilakukan lewat Majelis Mahkamah Rakyat, yang diketuai oleh Kadli Malikul Adil. Proses perkembangan kebangkitan Aceh Darussalam di bidang politik ini dilakukan untuk meningkatkan kedudukan wanita dalam berbagai bidang kehidupan baik di bidang pendidikan maupun bidang pemerintahan dan lainnya.

2) Proses Perkembangan Kebangkitan Aceh Darussalam dalam Bidang Ilmu Pengetahuan

Sultanah Tsafiatuddin banyak mengeluarkan dana membantu Hamzah Fansuri untuk membangun dan mengembangkan kesusasteraan, juga banyak membantu Abdul Rauf untuk mengarang kitab-kitab hukum. “Kedua pengarang tersebut pernah dikirim keluar Aceh untuk meluaskan pandangan dan memperdalam ilmunya, negara-negara yang pernah dikunjungi adalah Malaya, India, Kudus, Baghdad, Madinah, dan Makkah” (Adan, 2014: 216).

Sultanah Tsafiatuddin mendorong semangat kemajuan untuk perempuan. Sultanah Tsafiatuddin berpendapat bahwa agama Islam tidak membedakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Perempuan mempunyai hak untuk meningkatkan kehidupan pribadinya, serta berhak memperoleh pendidikan, misalnya mempelajari bahasa Arab, agar mampu membaca dan memahami isi kitab suci Al-Qur’an. Oleh karena itu, Sultanah Tsafiatuddin memerintahkan agar lembaga-lembaga pendidikan yang ada membuka kesempatan kepada kaum perempuan berdasarkan keyakinan tentang perlunya perempuan memperoleh pendidikan dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum laki-laki. “Sehingga Aceh dalam perjalanan sejarahnya telah menghasilkan tokoh perjuangan perempuan yang terkemuka” (Poeponegoro & Notosusanto, 2008: 400).

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses perkembangan kebangkitan Aceh Darussalam dalam bidang ilmu pengetahuan, bermula dari dorongan Sultanah Tsafiatuddin agar para ulama menulis berbagai disiplin ilmu pengetahuan, serta membantu Hamzah Fansuri untuk membangun dan mengembangkan kesusasteraan, juga banyak membantu Abdul Rauf untuk mengarang kitab-kitab hukum. Buku-buku dalam berbagai bidang ilmu karya

para ulama menjadi rujukan dan menjadi pusat peradaban perkembangan ilmu pengetahuan di Asia Tenggara. Sultanah Tsafiatuddin mendorong semangat kemajuan untuk perempuan, memerintahkan agar lembaga-lembaga pendidikan yang ada membuka kesempatan kepada kaum perempuan berdasarkan keyakinan tentang perlunya perempuan memperoleh pendidikan dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum laki-laki, dengan dibukanya pendidikan untuk perempuan memiliki tujuan menghasilkan perempuan terdidik yang mampu menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan baik di bidang politik, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya.

D. Dampak dari Masa Pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin bagi Kehidupan Masyarakat Aceh Darussalam

Masa pemerintahan Sultanah Tsafiatudin banyak mendapatkan rintangan baik dari dalam maupun dari luar, sebelum dan sesudah pengangkatan menjadi seorang Sultanah menuai banyak pro dan kontra, terutama dari kalangan ulama serta dari kalangan yang berpaham wujudiyah. Hal ini sesuai dengan pendapat berikut: Wujudiyah yaitu suatu paham tasawuf yang berasal dari paham wahdah al-wujud Ibnu 'Arabi yang memandang bahwa alam adalah penampakan (tajalli) Tuhan, yang berarti bahwa yang ada hanya satu wujud, yaitu wujud Tuhan, yang diciptakan Tuhan (termasuk alam dan segala isinya) pada hakekatnya tidak mempunyai wujud (Daudy, 1983: 3).

Sedangkan paham wujudiyah yang dianut Hamzah Fansuri mengandung pengertian bahwa “alam ini adalah ciptaan dari bahagian ketuhanan itu sendiri, laksana buih pada puncak ombak; jadi hampir sama dengan teori pantheism (serba dewa) atau monoism (serba esa)” (Hasjmy, 1977: 170).

1) Dampak dari Masa Pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin bagi Kehidupan Politik Masyarakat Aceh Darussalam

Sultanah Tsafiatuddin menjalankan pemerintahan yang lebih lunak, perubahan mendasar terjadi dalam kekuasaanya, sehingga melahirkan struktur kesultanan yang sangat berbeda, misalnya Sultanah Tsafiatuddin memerintahkan untuk membuka semua pusat pendidikan bukan hanya untuk laki-laki, namun juga untuk wanita. “Hal ini dilakukan untuk menyetarakan kedudukan wanita agar

sama dengan laki-laki dalam segala bidang pemerintahan di Aceh Darussalam” (Reid, 2011: 11).

Dengan jalan pendidikan kaum wanita dapat ditingkatkan kedudukan dan martabatnya dalam segala cabang kehidupan. Sultanah Tsafiatuddin menganjurkan bahkan mewajibkan kaum “wanita untuk belajar seperti kaum laki-laki, untuk bekerja dalam segala lembaga negara dan badan-badan pemerintahan, tidak terkecuali dalam ketentaraan” (Hasjmy, 1977: 121).

Pembangunan terhadap pertahanan militer dilakukan Sultanah Tsafiatuddin dengan membentuk pasukan khusus wanita, yang bertugas mengawal istana sekaligus sebagai pasukan elite kerajaan, serta “menyempurnakan kembali Dipisi Pengawal Keraton dan membina prajurit para wanita-janda menjadi semua wanita baik janda, bersuami ataupun gadis” (Astuti, 2013: 20).

Mempersiapkan tiga orang puteri bangsawan untuk menjadi sultanah dalam Kesultanan Aceh Darussalam dilakukan Sultanah Tsafiatuddin setelah pemerintahannya, yaitu; Nurul Alam Nakiatuddin Syah, Inayat Zakiatuddin Syah, dan Kamalat Syah. Ketiga puteri bangsawan tersebut telah dididik dalam Keraton Darud Dunia dengan berbagai ilmu pengetahuan: ilmu hukum, termasuk hukum tatanegara, sejarah, filsafat, kesusasteraan, pengetahuan agama Islam, bahasa Arab, bahasa Persia, dan bahasa Spanyol serta bahasa Inggris.

Kebijaksanaan dan kearifan Sultanah Tsafiatuddin yang cakap melihat jauh kedepan mempersiapkan kader sampai tiga orang penggantinya, hendak memperlihatkan kepada dunia, bahwa wanita juga sanggup memerintah kalau dididik dan diberi kesempatan. “Pengangkatan sultanah setelah Sultanah Tsafiatuddin tidak mengalami kesulitan dan sultanah pun tidak merasa bingung setelah dinobatkan menjadi sultanah selanjutnya” (Hasjmy, 1977: 199).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak dari masa pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin bagi kehidupan politik masyarakat Aceh Darussalam, dengan membuka semua pusat pendidikan bagi kaum wanita untuk menyetarakan kedudukan wanita agar sama dengan laki-laki dalam segala bidang pemerintahan di Aceh Darussalam, dengan mempersiapkan kader sampai tiga orang wanita sebagai pengganti Sultanah Tsafiatuddin yaitu; Nurul Alam Nakiatuddin Syah, Inayat Zakiatuddin Syah, dan Kamalat Syah, hendak

memperlihatkan kepada dunia, bahwa wanita juga sanggup memerintah kalau dididik dan diberi kesempatan.

2) Dampak dari Masa Pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin bagi Kehidupan Ekonomi Masyarakat Aceh Darussalam

Aceh terkenal sebagai daerah makmur, daerah penghasil emas. Sultanah Tsafiatuddin memperbaiki sarana dan prasarana penambangan emas, menerapkan kebijakan pemungutan cukai atau pajak pada setiap pedagang asing yang melakukan perdagangan dalam wilayah kekuasaan Aceh dan daerah taklukannya. “Sultanah Tsafiatuddin juga menerapkan kebijakan dagang yang cukup ketat terhadap Belanda. Belanda tidak diberi hak-hak istimewa dalam perdagangan” (Astuti, 2013: 20).

Sultanah Tsafiatuddin berhasil menghadapi Belanda (VOC) yang hendak memonopoli dagang. Kesultanan Aceh Darussalam kaya akan komoditas yang laku di pasaran dunia pada masa itu, seperti lada, timah, dan kapur barus. Oleh karena itu, sudah sejak lama “Aceh menjadi pusat perdagangan internasional, karena letaknya juga sangat strategis di jalur pelayaran dari Barat ke Timur dan sebaliknya” (Poesponegoro & Notosusanto, 2008: 400).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dampak dari masa pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin bagi kehidupan ekonomi masyarakat Aceh Darussalam hidup dalam kesantausaan dengan mengikuti perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Aceh Darussalam menjadi bandar yang sangat makmur, daerah penghasil emas. Sultanah Tsafiatuddin memperbaiki sarana dan prasarana penambangan emas, menerapkan kebijakan pemungutan cukai atau pajak pada setiap pedagang asing. Kesultanan Aceh Darussalam kaya akan komoditas yang laku di pasaran dunia pada masa itu, seperti lada, timah, dan kapur barus. Oleh karena itu, sudah sejak lama Aceh menjadi pusat perdagangan internasional, karena letaknya juga sangat strategis di jalur pelayaran dari Barat ke Timur.

3) Dampak dari Masa Pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin bagi Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat Aceh Darussalam

Bagi wanita Aceh sosok dan kepribadian Sultanah Tsafiatuddin menjadi salah satu rujukan dalam kehidupannya. Sementara bagi lelaki Aceh perlu menghargai kelebihan dan kebolehan seorang wanita yang memiliki kemampuan

dalam memimpin dan membina Tamaddun Melayu dari hujung pulau Sumatera itu, meskipun masih ada juga keraguan di kalangan pakar hukum Islam berkenaan dengan boleh tidaknya seorang wanita memimpin sebuah negara dalam Islam. Pada masa Sultanah Tsafiatuddin beliau sangat memberi wewenang yang besar kepada mufti untuk perkara yang menyangkut dengan hukum Islam, “Sultanah Tsafiatuddin hanya mengurus hal-hal yang agak khusus saja, dan itulah yang menyebabkan alim ulama membolehkan wanita memimpin negara waktu itu” (Adan, 2014: 216-217).

Pandangan tentang kedudukan wanita dalam kehidupan sosial sangat jelek dan dapat menjerumuskan wanita ke jurang kesesatan, menurut Sultanah Tsafiatuddin perlu segera diperbaiki, maka diajukanlah suatu rencana undang-undang kepada Majelis Mahkamah Rakyat, yang pada dasarnya bertujuan untuk merubah keadaan yang dianggap jelek. Akhirnya, “rencana undang-undang disahkan menjadi undang-undang. Demikianlah sekelumit dari usaha Sultanah Tsafiatuddin untuk meningkatkan kedudukan wanita dalam masyarakat” (Hasjmy, 1977: 127-128).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak kehidupan sosial-budaya masyarakat Aceh Darussalam, pada mulanya rakyat Aceh merasa sangsi dan kurang yakin terhadap pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin, namun usaha yang dilakukan Sultanah Tsafiatuddin dalam mempertahankan nasib rakyatnya membuat rakyat memiliki rasa hormat dan takjub. Sosok Sultanah Tsafiatuddin menjadikan motivasi bagi masyarakat Aceh pada masa itu untuk lebih menghargai kemampuan seseorang dalam memimpin dan membina Tamadun Melayu, kedudukan wanita pada masa itu belum diakui sehingga Sultanah Tsafiatudin memiliki peranan penting dalam memberikan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan pada suatu lembaga pemerintahan, pendidikan dan lain sebagainya.

4) Dampak dari Masa Pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin bagi Kehidupan Agama Masyarakat Aceh Darussalam

Dalam kehidupan beragama, masyarakat Aceh Darussalam memberi pengaruh baik seperti, sifat terpuji dari Sultanah Tsafiatuddin yang sangat takut akan Allah Ta’ala serta melaksanakan shalat tepat waktu. Sultanah Tsafiatuddin

gemar membaca Al-Qur'an dengan menyuruh orang berbuat kebajikan serta melarang berbuat kemungkaran. Sebagai sultanah perempuan pertama beliau dikabarkan memerintah dan menghukum sesuatu dengan sangat adil, sebagai akibat daripada sifat adil dan arif dari dirinya maka "banyak orang yang menuntut ilmu dan melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam pada masa pemerintahan Sultanah Tsafiatuddin" (Adan, 2014: 214).

Di bidang agama Sultanah Tsafiatuddin memerintahkan para ulama untuk menghidupkan kembali budaya menulis, sejumlah kitab berhasil ditulis dengan baik. Pada tahun 1668, Sultanah Tsafiatuddin mengutus beberapa ulama untuk berdakwah menyebarkan agama Islam di Siam (Thailand). "Dengan sepak terjangnya yang sangat memperhatikan kemajuan di bidang agama, akhirnya beberapa ulama yang awalnya menentangnya, berbalik menjadi mendukungnya" (Astuti, 2013: 19).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak kehidupan agama masyarakat Aceh Darussalam mendapat pengaruh yang baik dari sifat terpuji Sultanah Tsafiatuddin, yang memerintah dan menghukum dengan adil. Sultanah Tsafiatuddin memerintahkan para ulama untuk menghidupkan kembali budaya menulis, sehingga sejumlah kitab berhasil ditulis dengan baik, dengan sangat memperhatikan kemajuan di bidang agama, akhirnya beberapa ulama yang awalnya menentangnya, berbalik mendukung Sultanah Tsafiatuddin, dan dalam pemerintahannya Kesultanan Aceh Darussalam dikenal sebagai pusat kegiatan ilmu dan kebudayaan di daerah Asia Tenggara.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Dasar pemikiran Sultanah Tsafiatuddin dalam memimpin Aceh Darussalam bersumber dari Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 124 dan surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa hak dan kewajiban pria dan wanita itu sama dalam masyarakat bangsa dan dalam masyarakat dunia. Hal lain yang mendasarinya adalah pandangan bahwa wanita juga berhak memiliki dan memegang jabatan dalam negara maupun jabatan yang tertinggi sekalipun, asalkan wanita tersebut sanggup dan mempunyai pengetahuan untuk bidang-bidang jabatan yang akan dipegangnya.

Peranan Sultanah Tsafiatuddin dalam membangkitkan kejayaan Aceh Darussalam di bidang politik dan ilmu pengetahuan, di bidang politik, sultanah berupaya mempertahankan identitas Aceh, serta mengadakan pembaharuan dengan membuka kesempatan pendidikan bagi kaum wanita agar memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan wanita untuk bekerja dalam lembaga negara. Mendorong para ulama untuk menulis berbagai disiplin ilmu pengetahuan, sehingga para ulama yang rajin menuliskan buah pemikirannya ke dalam kitab, hal ini menjadi titik tolak kebangkitan tradisi tulis-menulis di Aceh Darussalam.

Proses perkembangan kebangkitan Aceh Darussalam dalam bidang politik dan ilmu pengetahuan pada masa Sultanah Tsafiatuddin. Sultanah Tsafiatuddin melakukan pembaharuan dalam struktur pemerintahan dengan memberikan dasar kesetaraan gender sehingga dapat memperluas pengertian demokrasi antara laki-laki dan perempuan di bidang politik. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Sultanah Tsafiatuddin mendorong para ulama menulis berbagai disiplin ilmu pengetahuan, sehingga buku-buku dalam berbagai bidang ilmu karya para ulama menjadi rujukan dan menjadi pusat peradaban perkembangan ilmu pengetahuan di Asia Tenggara.

Sultanah Tsafiatuddin membuka semua pusat pendidikan bagi kaum wanita untuk menyetarakan kedudukan wanita agar sama dengan laki-laki dalam segala bidang pemerintahan di Aceh Darussalam, bagi kehidupan ekonomi Aceh Darussalam menjadi bandar perdagangan internasional yang sangat makmur

karena letaknya strategis di jalur pelayaran dari Barat ke Timur , bagi kehidupan sosial-budaya masyarakat Aceh Darussalam termotivasi untuk lebih menghargai kemampuan seseorang dalam memimpin dan membina Tamadun Melayu, dan bidang kehidupan agama masyarakat Aceh Darussalam hidup rukun dengan mengikuti perintah Allah SWT dan Rasul-Nya karena senantiasa mengikuti ajaran Al-Qur'an & As-Sunah. Masyarakat Aceh Darussalam mendapat pengaruh yang baik dari sifat terpuji Sultanah Tsafiatuddin yang menjalankan pemerintahan secara adil, sehingga kewajiban sebagai muslim dan muslimah terutama dalam melaksanakan shalat lima waktu senantiasa tepat waktu, disamping menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sebagai umat Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, Dudung. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Balai Pustaka
- Abdy, A. 2013. *Aceh Kerajaan Tak Terlupakan*. Jakarta Selatan: PT Bina Sumber Daya Mipa.
- Adan, Hasanuddin Yusuf, 2014. *Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Al-Qur'an Surat Al-Imran ayat 137. *Al-Qur'an dan Terjemahnya: A-Aliyy* Penerbit Diponegoro.
- Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 124. *Al-Qur'an dan Terjemahnya: A-Aliyy* Penerbit Diponegoro.
- Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13. *Al-Qur'an dan Terjemahnya: A-Aliyy* Penerbit Diponegoro.
- Aries. 2014. *Peranan Keumalahayati Dalam Mempertahankan Kerajaan Aceh Dari Kolonialisme Portugis dan Belanda (1585-1604)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Palembang: Palembang
- Astuti, W. 2013. *Perempuan Pejuang (Jejak Perjuangan Perempuan Islam Nusantara Dari Masa ke Masa)*. Bandung: Konstanta Publishing House.
- Darmawan, Joko & Anwarsono, Lanang. 2016. *Mengenal Budaya Nasional (Kerajaan Nusantara)*. Jakarta: Erlangga.
- Daudy, Ahmad. 1983. *Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syeikh Nuruddin Ar-Raniry*. Jakarta: Rajawali.
- Hamid, Abdu Rahman dan Muhammad, Saleh Majid. 2011. *Pegantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Hasjmy. A. 1977. *59 Tahun Aceh Merdeka (di Bawah Pemerintahan Ratu)*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Irawan, Yovi. 2014. *Peranan Kerajaan Aceh Darussalam Dalam Penyebaran Agama Islam Di Aceh Darussalam Pada Tahun (1607-1636)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Palembang: Palembang.

- Madjid, Dien. 2013. *Catatan Pinggir Sejarah Aceh Perdagangan, Diplomasi, dan Perjuangan Rakyat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nurul, Zulaiha. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Poerwadarminta W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poesponegoro, Marwati Djoened & Notosusanto, Nugroho. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Reid, Anthony. 2011. *Menuju Sejarah Sumatera: Antara Indonesia dan Dunia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Said, Muhammad. 1961. *Aceh Sepanjang Abad*. Medan: Waspada Medan
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bnadung: CV. Alfabeta.